

PERAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM CITRA KOTA Studi Kasus: Taman Suropati, Jakarta

THE ROLE OF URBAN OPEN SPACE IN A CITY IMAGE Case Study: Taman Suropati, Jakarta

Ardianti Permata Ayu
Program Studi Desain Interior, Universitas Gunadarma
ardiantipermata@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam tata ruang kota. Peran yang akan diteliti tidak hanya sebagai vegetasi untuk menyeimbangkan lingkungan saja, melainkan juga memiliki peran dalam citra sebuah kota, khususnya kota Jakarta sebagai kota urban, dengan studi kasus Taman Suropati Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat peran taman kota dan kaitannya dengan sebuah citra kota. Metodologi yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggabungkan pendekatan kajian tata ruang kota dengan kajian budaya secara historis-diakronis. Temuan yang didapatkan yaitu bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting dalam citra sebuah kota antara lain sebagai landmark, 'penyambung lidah rakyat', tempat interaksi masyarakat, tempat yang dapat menampung aspirasi rakyat, serta memiliki nilai tersendiri secara kesejarahan.

Kata Kunci: citra kota, ruang terbuka, ruang publik, taman kota.

Abstract

This study aims to explain how a Ruang Terbuka Hijau (RTH) has an important role in city spatial planning. The role to be studied is not only as a vegetation to balance the environment, but also has a role in the image of a city, especially Jakarta as an urban city, within case study Taman Suropati Jakarta. The aim of this research is to see the role of urban city space (city park) and its relation with city image. The methodology used is descriptive qualitative that combine the urban planning studies and cultural studies by the diachronic histories. The result of this research is the urban open space has significant role for the city image, they are as a landmark, as a place to communicate with the civil, a place for the civil interaction, a place for the civil aspiration, and has a historical value.

Keywords: city image, urban open space, public space, city park.

PENDAHULUAN

Sebagai kota urban, Jakarta memiliki daya tarik bagi para pendatang. Pusat berkembangnya modernitas, infrastruktur, serta pusat kekuasaan politik dan budaya berada di ibukota ini. Oleh karena itu, kota ini selalu mengalami peningkatan penduduknya dengan pesat. Banyaknya pendatang dari berbagai daerah yang tinggal menetap maupun hanya untuk bekerja di Jakarta, membuat lingkungan kota Jakarta padat penduduk dan penuh polusi. Kepadatan penduduk menyebabkan lahan pemukiman terus bermunculan yang pada

akhirnya tidak ada lagi lahan yang dapat menampung air hujan. Sehingga membuat kota ini menjadi tidak sehat, bahkan sering kali terjadi banjir. Kini kondisi lingkungan Jakarta, sebagai kota yang menjadi pusat modernitas ini, menjadi semakin parah seiring berkurangnya daerah resapan air. Hal tersebut bertentangan dengan konsep ideal kota modern, yaitu kota yang modern adalah kota yang mampu memadukan pertumbuhan sosial-ekonomi dengan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, keberadaan vegetasi kota bisa mencerminkan

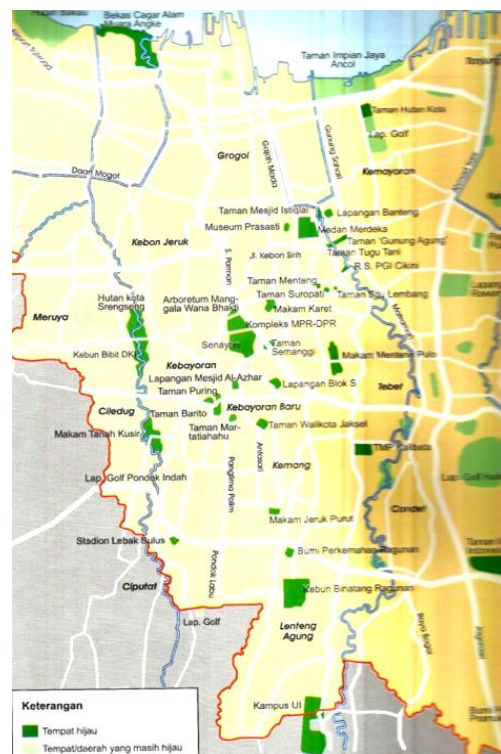
seberapa beradabnya masyarakat di suatu kota.

Oleh karena itu, kota Jakarta sangat membutuhkan ruang yang memiliki vegetasi baik yang dapat membantu mengatasi banjir dan polusi udara cukup signifikan. Adalah RTH atau Ruang Terbuka Hijau, sebuah ruang terbuka yang dapat digunakan untuk publik serta memiliki vegetasi yang baik untuk menyeimbangkan lingkungan kota besar seperti Jakarta. RTH pada khususnya sangat vital keberadaannya di kota besar. Jika dilihat dari sudut pandang lingkungan, pohon-pohon besar yang tumbuh di RTH bisa menjadi paru-paru kota yang mampu menyerap polusi udara dari corong-corong yang tak berhenti mengeluarkan asap. Selain itu, RTH juga dapat menjadi area resapan air yang bisa mengurangi risiko banjir. Idealnya, sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari luas kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, pada tahun 2011, RTH di Jakarta baru mencakup 9.84 persen dari luas kota.

Taman Kota adalah salah satu Ruang Terbuka Hijau, yang sangat penting bagi sebuah struktur kota yaitu antara lain (Heuken, 2001): (1) Dapat menahan air hujan, sehingga dapat mereduksi bahaya banjir; (2) Sebagai penyerap polusi udara—asap, debu—menyegarkan udara dan menghasilkan O₂; (3) Memungkinkan terjaganya ekosistem flora maupun fauna khas daerah setempat; (4) Menjadi habitat satwa; (5) Menyediakan tempat istirahat yang sejuk; (6) Membersihkan air sungai, danau/situ dan laut; (7) Menurunkan suhu dan tingkat kebisingan kota.

Sebelumnya Jakarta memiliki jalur hijau dalam perancangan tata kotanya ketika ruang terbuka hijau (RTH) secara fisik (bentuk) dibagi menjadi dua yaitu taman kota dan hutan kota. Di Jakarta, jumlah taman kota lebih banyak ketimbang hutan kota. Hal ini disebabkan banyaknya lahan yang memang

zaman Kolonial. Jalur hijau yang pernah memisahkan Jakarta dari Kebayoran Baru kini hilang, bahkan kini jalur hijau Tebet dibiarkan semakin mengecil. Hal ini dikarenakan banyaknya pemukiman liar, pompa bensin dan kaki lima. Bahkan di daerah bekas ‘Kota Taman’ yaitu Menteng dan Kebayoran Baru—kini banyak yang hilang akibat pemilik rumah yang menutupi lahan hijaunya dengan beton/batu sebagai garasi/tempat parkir atau rumah tambahan (Heuken, 2001). Akibatnya, beberapa tempat di Jakarta sering terendam banjir. Diperparah lagi dengan banyaknya *real estate* yang kurang menyediakan ruang terbuka hijau dan pohon di sepanjang pinggir jalan.



Gambar 1. Daerah Hijau di Jakarta pada akhir abad ke-20.

sudah dijadikan pemukiman dan perkantoran, sehingga untuk menyesuaikan lingkungan tersebut, taman kota masih dipertahankan daripada hutan kota. Walaupun jumlahnya masih kurang berdasarkan undang-undang di

atas, taman kota di Jakarta cukup banyak. Ada yang baru dibuat dan dipugar sejak pasca-reformasi, ada juga yang memang sudah dibuat sejak zaman kolonial.

Secara kesejarahan, taman kota di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial. Taman-taman kota muncul ketika pembangunan dilakukan oleh Kolonial di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Batavia (kini Jakarta), sejalan dengan adanya isu lingkungan hidup yang terjadi di sebagian wilayah Eropa akibat pembangunan secara besar-besaran pasca-revolusi industri. Namun, kemudian pembangunan atas taman kota ini terhenti bersamaan dengan kemerdekaan di Indonesia, ketika Presiden Soekarno lebih memilih pembangunan megapolitan dalam proyek politik mercusuarinya “*New Emerging Forces*”. Oleh sebab itu, taman-taman kota di kota-kota besar di Indonesia mulai terlupakan.

Ada banyak hal yang berkaitan dengan taman kota, baik itu mengenai keseimbangan lingkungan, kebutuhan warga kota akan ruang terbuka publik untuk beraktivitas hingga mengenai memori kolektif masyarakat kotanya (kesejarahan). Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi citra atas tata ruang suatu kota. Untuk itu, tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana peran taman kota sebagai ruang terbuka hijau dalam citra suatu tata ruang kota di kota urban, dengan studi kasus Taman Suropati di Menteng Jakarta Pusat.

Taman Suropati dipilih menjadi studi kasus pada penelitian ini dikarenakan Taman Suropati merupakan taman kota yang memang sudah ada dari sejak zaman Kolonial Belanda, sehingga memiliki nilai kesejarahan yang sesuai untuk dijadikan sumber penelitian. Selain itu, Taman Suropati tidak mengalami perubahan secara signifikan pada wujud fisiknya, seperti halnya pada Taman Menteng atau Taman Lapangan Banteng misalnya. Lingkungan di sekitar Taman yang memiliki luas 1.173 m² dari luas keseluruhan 16.328 m², berada di kawasan elit dan kawasan kedutaan, serta kegiatan pengguna yang lebih

beragam pada Taman Suropati juga merupakan alasan tempat ini dipilih sebagai sumber penelitian. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk melihat peran dan memberikan perspektif tentang pentingnya sebuah taman kota dalam infrastruktur tata ruang kota, serta kaitannya dengan sebuah citra kota, termasuk nilai kesejarahan. Tidak hanya itu, diharapkan kajian ini bermanfaat untuk kepentingan praktis maupun untuk kepentingan memberikan kontribusi kepada pemikiran di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, metodologi yang digunakan yaitu observasi kualitatif dengan menggabungkan pendekatan kajian tata ruang kota (*urban planning*) dengan budaya (*cultural studies*) secara historis-diakronis. Berdasarkan hal tersebut, analisis dikaitkan pada masalah-masalah sosial sebagai kondisi realitas dalam rentang waktu secara runut, yakni era kolonial hingga saat ini. Penulis melakukan analisis data pada kajian ini dengan cara induktif, sehingga teori menjadi dasar dalam melakukan analisisnya.

Fokus penelitian ini yaitu pada Taman Suropati sebagai korpus penelitian yang diawali dengan melakukan penelusuran data secara kesejarahan, baik pustaka maupun lapangan. Data pustaka merupakan data yang terkait dengan korpus penelitian, yaitu taman kota dan Taman Suropati. Sedangkan data lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung, melalui pendekatan Etik dan Emik. Pendekatan Etik digunakan untuk mengungkapkan bagaimana kegiatan-kegiatan berlangsung di dalam suatu ruang, hubungan-hubungan yang terjadi dan perubahan temporer yang dapat terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengamatan terhadap perilaku dan kondisi fisik komponen tata ruang menjadi cara dalam memperoleh data. Pendekatan Emik yaitu memperoleh data dilakukan dengan

mengadakan wawancara pada subjek pengguna ruang (pengguna Taman Suropati). Data yang diperoleh dalam kajian ini, baik data literatur maupun lapangan yang berbentuk amatan (observasi) dan wawancara, akan disajikan dalam bentuk gambaran mengenai situasi atau kejadian berupa interpretasi penulis. Data tersebut kemudian akan dipilih dan dianalisis menggunakan teori sebagai pisau analisisnya untuk dicari hipotesisnya.

Literatur dan teori yang digunakan merupakan teori dan literatur yang terkait dengan kata kunci, yaitu citra kota, ruang terbuka hijau, ruang publik, dan taman kota. Dalam kajian budaya yang terkait dengan ruang kota, Setha Low (1999) melakukan pelacakan sejarah tata ruang dan memperhatikan dialektika antara konsep tata ruang yang diimplementasikan ke dalam wujud fisik tata ruang. Untuk dapat membedah bagaimana citra tata ruang kota terbentuk, kajian ini akan membatasi pada elemen pembentuk citra kota menurut Lynch (1975) sebagai variabel penelitian yang akan diteliti, antara lain *path*, *edges*, *districts*, *nodes*, dan *landmark*. Dalam hal ini, citra kota terkait dengan identitas. Citra kota dapat diproduksi secara singkat, namun belum tentu akan merepresentasikan identitas tertentu pada suatu kota. Hal ini dikarenakan identitas suatu kota membutuhkan waktu dan proses ritme sejarah yang lama dan panjang untuk membentuknya (konstruksi identitas). Oleh karena itu, penelitian akan sejarah kota juga menjadi elemen yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sehingga akan didapatkan perubahan tata ruang dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan dalam konteks kesejarahan dan sosial politik yang sangat dinamis, dengan harapan dapat mengungkap citra dan identitas yang terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taman Kota dan Ruang Publik

Citra sebuah kota pada umumnya terbentuk dari masyarakat yang mengisinya, ada yang condong pada aspek ekonomi, pendidikan, industri, budaya, dan lain sebagainya. Selain terbentuk secara alamiah melalui aktivitas masyarakatnya, dewasa ini citra kota sengaja dibentuk, dan diarahkan oleh pemerintah setempat. Pada beberapa kota besar di Indonesia, citra sebuah kota juga terbentuk dengan menyertakan aspek historis. Sebut saja Semarang, Jakarta, dan Bandung. Kendati aspek historis tersebut ditonjolkan dalam porsi yang beragam, namun nilai-nilai historis selalu berusaha dimunculkan.

Sebelum membahas tentang taman kota dan bagaimana identitas citra kota terbentuk pada Taman Suropati, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang ruang publik, karena taman kota merupakan ruang publik terbuka yang bebas diisi makna namun juga dapat dikontrol oleh kuasa tertentu. Dengan mengkaji pola dan makna ruang publik pada Taman Suropati dalam rentang sejarah, maka makna atas taman kota tersebut dapat terungkap. Pengungkapan makna di sini tentunya akan membantu bagaimana identitas citra kota yang ditampilkan.

Taman kota tergolong sebagai ruang publik karena dapat digunakan secara umum. Carmona (2003) dalam bukunya *Publik Space-Urban Space*, mengatakan bahwa ruang publik sendiri secara umum merupakan sebuah tempat yang dapat menampung masyarakat luas. Siapapun dapat menggunakan ruang publik, karena dapat pula dimaknai sebagai tempat milik semua orang. Ruang publik sepertinya memiliki arti yang melebihi bentuk fisiknya, tidak hanya sekedar sebuah penampungan umum. Ruang publik dimiliki dan diperuntukkan bagi masyarakat luas maupun masyarakat tertentu. Ruang publik merepresentasikan 'kepentingan publik' pendahulunya, berupa impian, harapan dan juga kegelisahan masyarakat. Dalam hal ini, ruang yang tergolong ruang publik antara lain: sebuah lapangan, tempat belanja, museum,

rumah sakit, jalanan, dan sebagainya, termasuk juga taman kota.

Secara idealnya, menurut Stephen Carr (1994) ruang publik harus dapat memenuhi 3 hal, yakni: (1) Responsif, yaitu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan; (2) Demokratis, yaitu ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya, serta mudah dicapai; (3) Bermakna, yaitu memiliki tautan antara manusia, ruang serta memiliki konteks sosial yang mewadahi ‘memori kolektif’ mereka. Oleh karena itu, dengan memahami dan melihat aktivitas masyarakat pengguna ruang publik dan agen-agen yang berperan (relasi kuasa) secara kesejarahan (mengungkap memori yang terbentuk), akan menjadi penting dalam membedah identitas citra suatu tata kota.

Bebasnya taman kota diisi oleh masyarakat, tidak membuat ruang publik ini menjadi pasif akan makna. Taman kota tetap dapat menjadi ruang yang aktif dimaknai oleh berbagai pihak yang menguasainya untuk mengontrol dan membentuk kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, taman kota tidak pernah bebas dari pemaknaan oleh berbagai pihak yang mengisi ruang tersebut dengan berbagai benda, makhluk, bangunan, pengumuman, peraturan, monumen, pagar, cerita, representasi, pertunjukkan, dan lain sebagainya. Pemaknaan ruang publik sering kali menentukan kondisi dan citra ruang tersebut karena makna ikut berperan serta dalam membentuk persepsi, pengalaman dan tindakan sosial (Kusno, 2009). Pengalaman dan memori yang terdapat dalam taman kota menjadi sangat berperan dalam pembentukan identitas tata ruang kota, walaupun citra yang diproduksi oleh penguasanya mengalami beberapa perubahan. Menurut Kusno (2009) taman kota juga memiliki signifikansi yang setara dengan monumen yang biasa dijumpai, karena taman kota sebagai ruang terbuka publik juga memainkan peran penting dalam mengekspresikan pandangan-pandangan

politik, memuat ingatan-ingatan masyarakat, dan menentukan identitas teritorial dan kolektif.

Taman Suropati dan Perannya atas Citra Ruang Kota

Lokasi Taman Suropati yang berada di Ibu kota---khususnya Menteng---tidak lepas dari peranan pemerintah kota maupun pusat. Bila ditinjau dari struktur tata kota, Taman Suropati ini berdiri di Ibukota Negara—yaitu DKI Jakarta---yang juga merupakan tampilan wajah atau merupakan representasi identitas Negara RI. Taman Suropati ini menjadi penting maknanya karena merupakan bagian dari sebuah struktur tata kota. Tidak hanya sebagai bagian dari sebuah struktur tata kota, namun taman ini juga memiliki makna jika dilihat dari perspektif kesejarahan. Dalam tinjauannya itu, taman ini mengalami perubahan-perubahan makna, termasuk fungsi dan subjek penggunaannya---yaitu masyarakat yang menggunakan. Taman Suropati sebagai tempat terbuka yang teduh---banyak pohon besar---mempunyai nilai lain tidak hanya sebatas “hijau” saja, tidak hanya menjadi paru-paru kota saja, melainkan juga dapat dimaknai sebagai ruang terbuka yang memiliki nilai simbolik, nilai kesejarahan, dan bahkan nilai sosial.

Taman Suropati merupakan taman kota yang memiliki sejarah panjang yang maknanya selalu berubah-ubah, baik secara sengaja dibentuk (dikonstruksikan) maupun secara tidak sengaja makna terbentuk. Dalam pembangunan awalnya, sudah tentu taman ini diproduksi dengan memiliki makna dan tujuan tertentu, sesuai dengan ide gagasan pembuatnya, yaitu Kolonial Belanda. Dalam pembangunannya, pemerintah Kolonial membangun beberapa taman kota di Indonesia, termasuk Taman Suropati, bersamaan dengan pembangunan konsep tata ruang kota yang dibangun ketika itu.

Secara fungsional taman kota di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam

rencana sebuah tata kota, yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda pada eranya. Tidak hanya sebagai vegetasi untuk menyeimbangkan lingkungan, melainkan juga untuk dapat mewedahi kegiatan masyarakat ketika itu. Walau begitu, kedudukan taman kota di Indonesia secara tidak langsung mendapatkan banyak pengaruh kultural dari masyarakat Eropa yang dibawa oleh pemerintah Kolonial Belanda. Perancangan kota yang dibuat merupakan perancangan tata kota yang berasal dari Eropa yang dipindahkan—diaplikasikan—di Indonesia yang menyesuaikan kondisi lingkungan dan kultural di Indonesia. Hal tersebut membuat prinsip tata ruang kota Eropa yang dibawa untuk diterapkan tetap disesuaikan dengan struktur tata ruang dan kultur di Indonesia di zaman Kolonial.

Masyarakat Eropa memiliki budaya berkumpul—berpesta atau mengadakan suatu acara—di ruang publik yang terbuka. Sehingga taman kota menjadi sangat penting keberadaannya bagi masyarakat Eropa. Hal ini menguatkan arti taman kota sebagai komponen pendukung penting dalam rancangan sebuah tata kota Eropa. Jika dilihat dari sudut pandang emosional dan simbolik, taman kota juga mampu mengakomodasi jejak-jejak budaya. Hal ini terlihat dari usaha pengekalan kenangan kolektif masyarakat ketika itu.

Konsep *tuinstad*—Kota Taman—dalam perancangan tata kota di Indonesia, merupakan konsep yang saat itu (baca: era Kolonial) sedang melanda negara-negara di Eropa sebagai respons kondisi kota-kota pasca era industrialisasi. Konsep tersebut merupakan titik awal perancangan kota menjadi dasar perancangan kawasan permukiman bangsa Belanda di Indonesia. Desainnya juga dirancang serupa mungkin dengan kondisi kawasan permukiman yang ada di Eropa pada masa itu.

Ketika itu lingkungan kota-kota di Eropa sudah mulai tidak sehat setelah revolusi

industri, maka menjelang abad 20 muncullah pemikiran-pemikiran perbaikan lingkungan kota. Lalu tokoh sosialis bermunculan membela kaum buruh dan muncullah ide pembuatan “kota-kota industri” (*Industrial city*) yang prinsipnya membangun industri harus bersama dengan pembangunan lingkungan yang teratur, serta terlindung dari pencemaran. Kota-kota tersebut disebut oleh Spiro Kostof sebagai “*The Cosmos of Workers*”. *Cosmos* maknanya yaitu mengagungkan, yaitu kepada para pekerja. Ide-ide *Industrial Cities* dari kaum sosialis direalisasikan oleh para arsitek seperti Claude Nicolas Ledoux, dengan kota Chaud, Tony Garnier dengan *la ville industrielle* di Perancis. “Kota” pekerja tersebut dikembangkan dalam konteks mengatasi masalah kongesti (kepadatan) kota London yang tidak sehat. Kota-kota ideal tersebut direalisasikan oleh Arsitek Raymond Unwind dan Berry Parker yang penuh dengan taman dan *green belt*. Keindahan desain kota tersebut akhirnya mendominasi model kota tersebut sebagai *The Garden City*, yang akhirnya sampai sekarang orang melupakan dasar sosial kota tersebut sebagai kota buruh, kota industri dan transisi urbanisasi (Soetomo, 2009).

Ide menangani masalah lingkungan yang tidak sehat juga muncul oleh arsitek Perancis Le Corbusier, yang mengetengahkan model kota baru yang menggegerkan dunia dalam dogma Arsitektur modernnya, yaitu suatu kota bercahaya, (*La Ville Radieuse*), sebagai “*La ville contemporaine*” (kota modern). Le Corbusier disebut sebagai perencana lingkungan pemukiman (*Le Plan Voisin*) yang ideal. Suatu desain lingkungan pemukiman modern bertingkat tinggi dengan ruang hijau yang luas, membongkar pemukiman tua, tetapi tetap mempertahankan bangunan-bangunan tua bersejarah yang memiliki peran penting sebagai kenangan (memori). Ketika itu Le Corbusier mendesain kota modern sebagai kota yang dibangun melalui bangunan bertingkat tinggi yang berjarak lebar untuk mendapatkan ruang

terbuka dengan taman-taman yang luas, cahaya yang cukup, serta sirkulasi udara yang mengalir baik (Soetomo, 2009). Konsep bangunan tinggi saat itu tidak diterapkan di Indonesia mengingat iklim yang tidak sesuai, namun konsep banyaknya taman kota dan ruang terbuka diterapkan di Indonesia oleh para arsitektur kota dari Belanda.

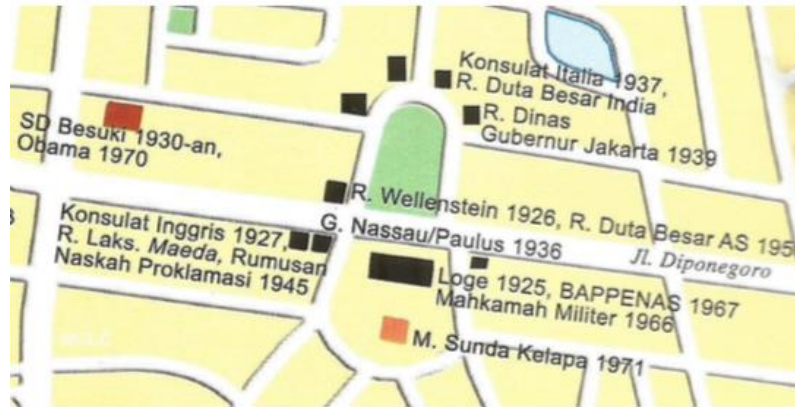
Pengaruh English *Landscape Gardening* juga ikut masuk ke Indonesia pada masa kolonial lewat arsitek dan perencana dari Belanda. Pada masa inilah dikenal istilah-istilah ruang terbuka hijau atau taman antara lain: *Plein, Park, Plantsoen, Stadthuis* dan juga *Boulevard*. Dari sekian istilah tersebut, dapat dikatakan bahwa ruang terbuka hijau dengan istilah *Park*-lah yang benar-benar direncanakan oleh Kolonial sebagai suatu wadah kegiatan publik dan mempunyai konsep-konsep tersendiri. Konsep yang dibangun untuk dicitrakan yaitu selain untuk mewadahi aktivitas masyarakat Kolonial, juga untuk ruang pengingatan, tempat meletakkan monumen dari para tokoh yang telah berjasa bagi pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, taman-taman (*Park*) juga dapat merupakan suatu bagian integral dari suatu fungsi bangunan di sekitarnya serta ikut menunjang eksistensi dan bentuk bangunan, khususnya bangunan penting bagi pemerintah Hindia Belanda (Firenza, 2000).

Setelah pembangunan taman-taman kota dalam konsep perancangan Kota Taman, pemerintah Belanda kemudian menggunakannya sebagai ruang terbuka hijau tempat rekreasi aktif dengan segala komponen-komponen desain yang mendukung seperti lapangan rumput, perbukitan dan bahkan kolam-kolam. Dari keberadaan taman-taman tersebut maka ikatan-ikatan antar segmen yang terdapat di kota lebih akan terlihat fungsinya sebagai ruang terbuka publik. Taman digunakan sebagai wadah aktivitas rekreasi yang bisa

berbentuk aktif maupun pasif, karena memang didesain untuk hal-hal tersebut. Didukung juga dengan kultur masyarakat Belanda yang banyak menggunakan taman sebagai wadah aktivitas luar mereka, maka keberadaan taman-taman sebagai suatu *urban park system* yang aktif dapat diwujudkan (Kunto, 1986).

Taman kota tentunya menjadi sangat berperan penting bagi warga Belanda yang tinggal di Indonesia, namun tidak bagi masyarakat Pribumi. Hal ini disebabkan karena adanya dikotomi, yakni pemisahan hak atas penggunaan ruang publik. Pemisahan dibagi menjadi area Pribumi, pendatang dan warga Belanda. Warga Belanda dapat menggunakan taman kota tanpa batasan, sedangkan masyarakat Pribumi menggunakan ruang terbuka publik di alun-alun. Alun-alun merupakan ruang terbuka yang berada di depan area istana (Keraton) atau Bupati. Berdasarkan hal itu, masyarakat Pribumi tetap tidak dapat dengan bebas menggunakan ruang terbuka publik, karena ruang tersebut (alun-alun) juga memiliki aturan-aturannya yang dikontrol oleh Keraton atau Bupati. Pembedaan penggunaan taman sebagai ruang terbuka publik di era Kolonial dimaksudkan untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai anggota kelompok golongan yang berkuasa dan untuk membedakan kedudukannya dengan rakyat pribumi. Mereka tinggal berkelompok di bagian wilayah kota yang dianggapnya terbaik (Soekiman, 2000).

Dikotomi atau pemisahan ini berlangsung selama bertahun-tahun selama keberadaan taman-taman kota di Indonesia secara umum, termasuk Taman Suropati yang berada di lingkungan elit warga Belanda ketika itu Pembagian kawasan kota dibagi menurut golongan-golongan dalam masyarakat berdasarkan ras menunjukkan keinginan penguasa kolonial dalam menjaga.



Gambar 2. Peta Burgemeester Bischoffplein (Taman Suropati) dan lingkungannya

kestabilan sosial-budaya demi kelangsungan kekuasaan kolonial pada masa itu. Selain adanya aturan penggunaan ruang terbuka publik, masyarakat Pribumi juga tidak terbiasa beraktivitas di taman-taman kota. Masyarakat Pribumi lebih nyaman beraktivitas luar menggunakan halaman depan rumahnya (Kunto, 1986). Masyarakat Pribumi juga menganggap alun-alun sebagai halaman rumah mereka (Prof. Van Romondt, 1962 dalam Kunto 1986). Sehingga alun-alun pun lebih “laku” dibanding ruang-ruang terbuka lainnya, karena masyarakat pribumi lebih merasa nyaman beraktivitas di alun-alun dan halaman rumah mereka dibanding dengan beraktivitas di taman-taman kota seperti Taman Suropati yang lebih cocok bagi masyarakat Eropa. Tidak hanya itu, perbedaan kultur juga membuat warga Pribumi menjadi enggan menggunakan taman kota.

Masyarakat pribumi tidak mengenal konsep *single-use* seperti yang lebih dianut bangsa-bangsa di Eropa. Warga pribumi lebih mengenal konsep *multi-use* pada suatu wadah tertentu. Ruang akan lebih laku jika dapat digunakan untuk fungsi yang bermacam-macam, tidak seperti taman kota yang tidak dapat digunakan untuk beragam kegiatan sehari-hari. Hal ini memang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari seperti menjemur hasil panen di halaman rumah, atau bahkan di pinggir jalan sekalipun. Pada situasi ini vegetasi yang digunakan di taman-taman di

kota mutlak hanyalah sebagai elemen estetis. Tanaman digunakan sebagai elemen visual, peneduh dan juga sebagai wewangian. Hal itu tidak berlaku di masyarakat pribumi.

Pasca kemerdekaan, kondisi taman kota menjadi memprihatinkan, akibat asingnya taman kota bagi warga Pribumi, termasuk Taman Suropati. Mereka tidak terbiasa menggunakan taman kota sebagai ruang aktivitas bersama. Untuk menggunakannya, warga pribumi tidak bisa langsung begitu saja “pindah” ke taman-taman tersebut. Sekali lagi, mereka merasa asing berada di taman-taman tersebut, karena mereka merasa bahwa taman-taman tersebut bukan milik mereka, dan bukan halaman rumah mereka (Soekiman, 2000).

Di awal kemerdekaan (era Soekarno), ketika ruang kota Jakarta sebagai ibukota telah direbut dari kolonial oleh Soekarno, ruang-ruang publik sudah diberikan akses kepada berbagai elemen masyarakat untuk digunakan. Taman Suropati menjadi memiliki citra lain, tidak lagi sebagai taman kota untuk diisi bagi warga Belanda. Taman ini menjadi sepi, yaitu tidak banyak diisi oleh aktivitas masyarakat pribumi, bahkan lebih sepi lagi, karena ketika itu Belanda sudah tidak menjadi dominan warga Belanda banyak yang pergi dari Indonesia. Taman Suropati menjadi tempat terbuka teduh yang kosong makna. Hal ini terjadi karena taman ini masih dikelilingi oleh lingkungan elit yang ‘penting’, yang juga tidak mungkin untuk menggunakan taman ini

secara aktif. Selain itu, pada era Soekarno simbol kekuasaan Gubernur Bisschop pada taman ini telah dihapus, sebagai bentuk pelupaan atas kekuasaan sebelumnya (kolonial). Taman yang awalnya bernama Burgemeester Bischoffplein ini berganti nama menjadi Taman Suropati--diambil dari salah satu nama pahlawan Untung Suropati. Ketika itu penggantian terhadap jejak Kolonial tidak hanya dilakukan pada nama Taman Suropati, tetapi juga pada beberapa jalan di daerah Menteng sekitar Taman Suropati.

Jika dilihat dari sudut pandang emosional dan simbolik, taman kota juga mampu mengakomodasi jejak-jejak budaya. Hal ini terlihat dari usaha pengekalan kenangan kolektif pemerintah dan masyarakat ketika itu. Dalam studinya tentang kota, D.C.D. Pocock berpendapat bahwa sifat cair ruang memang terkait dengan keterbukaannya terhadap pembacaan subjektif: berjenis-jenis makna yang mungkin dibubuhkan pada sebuah bangunan atau gambar sebuah kota di antaranya bersifat konkret, fungsional, emosional, dan simbolik, yang kesemuanya penting dalam personalitas kota (Pocock, 2002). Demikian halnya dengan taman kota sebagai sebuah ruang, memiliki makna penting dalam pembentukan personalitas kota, baik itu secara fungsional, emosional, ataupun simbolik.

Sibuknya pemerintah kota maupun pusat dengan pembangunan kota metropolitan telah membuat taman-taman kota menjadi terbengkalai. Pemerintah di era Orde Baru hanya memperhatikan pembangunan yang serba megah seperti: gedung pencakar langit, jalan layang, pertokoan, *real estate*, apartemen. Hal ke semua itu sangatlah menguntungkan bagi pemerintah, namun berakibat buruk bagi perkembangan tata kota. Hal tersebut juga berdampak pada kondisi taman-taman kota termasuk Taman Suropati kala itu - konsep pemerintahan “Pembangunan Nasional”. Dampaknya sudah pasti soal kualitas dan kuantitas dari taman kota yang

jauh dari memenuhi syarat. Sesuai dengan pandangan yang menyatakan bahwa: “perencanaan fisik saja tidak akan dapat meningkatkan kondisi kehidupan di kota-kota, kecuali jika diterapkan secara terpadu dengan perencanaan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan” (Patrick Geddes dan Catanese, 1996 dalam Ahmad, 2002), dapat dilihat identitas kota yang terbentuk tidaklah sesuai dengan citra kota yang diinginkan pemerintah Orde Baru kala itu. Jika merujuk pada pernyataan di atas, maka dapat diungkapkan bahwa dalam perencanaan dan perancangan kota perlu berlandaskan pada aspek sosial dan budaya.

Taman-taman kota hanya menjadi hutan tempat penuh dengan tanaman tanpa ada aktivitas manusia---yang dipagari oleh Pemerintah kala itu. Hal ini terjadi pada Taman Suropati di era Soeharto, taman ini menjadi sepi dari aktivitas di dalam tamannya, karena memang dipagari sehingga orang enggan memasukinya. Kemudian taman ini, menjadi tempat para penjual lukisan berjualan di luar pagar pada era akhir tahun 80-an hingga awal 90-an. Ada hal lain (baca: perubahan) yang membuat taman ini walau pasif tetapi memiliki nilai lain ketika itu, yaitu nilai simbolik. Ketika para anggota ASEAN ikut berperan dalam mengisi kekosongan Taman Suropati pada tahun 1982, dengan meletakkan patung yang *sophisticated* (kontemporer atau bahkan futuristik), taman ini pun dimaknai menjadi “Taman Patung ASEAN”. Dalam hal ini, revitalisasi ruang terbuka dapat dilihat dari perubahan yang terjadi, dan melihat ke depan sebagai sumber daya untuk dihidupkan kembali atau bahkan dimaknai kembali.

Untuk memperlihatkan bentuk suatu kota yang merupakan hasil dari nilai kehidupan, John Brickerhoff Jackson menulis dalam bukunya, “*Founding Vernacular Landscape*”, menyatakan bahwa “bentuk kota adalah citra dari kehidupan kemanusiaan yang kita tampilkan yaitu kerja keras, harapan yang

tinggi dan kebersamaan untuk saling berkasih sayang”. Maksudnya, kota adalah suatu tempat tinggal manusia yang merupakan manifestasi dari hasil perencanaan dan perancangan yang dibuat dan diisi oleh manusia itu sendiri, yang dipenuhi oleh berbagai unsur seperti bangunan, jalan, dan ruang terbuka publik. Dengan demikian, suatu kota adalah hasil dari nilai-nilai perilaku manusia dalam ruang kota yang membuat pola kontur visual dari lingkungan alam (Jackson, 1984, dalam Soetomo, 2009).

Keteduhan di Taman Suropati kemudian menjadi berguna bagi para tentara beristirahat dan pedagang asongan, ketika terjadi peristiwa kerusuhan Mei (reformasi) terjadi di Jakarta untuk melindungi penduduk kawasan Menteng termasuk rumah Soeharto sebagai Presiden RI kala itu. Taman ini menjadi taman yang *idle*, pasif, serta dikelilingi arus lalu lintas yang bergerak cepat yang hanya sekadar lewat di area tersebut. Bukan lagi sebagai taman (tempat) teduh---oleh pohon yang dapat dinikmati masyarakat di sekitarnya, seperti idealnya sebuah taman kota ketika direncanakan/dibangun oleh pembuatnya dahulu (baca: kolonial).

Sesuai dengan pemikiran Ahamadin Ahmad, Kota bukanlah hanya kumpulan gedung, lahan, jalan dan penduduk yang penuh sesak hilir mudik. Namun, kota memiliki jiwa yang menjadi ciri yang membedakan satu kota dengan kota lainnya. Kota tumbuh dan berkembang sebagaimana organisme yang lain sehingga boleh jadi sebuah kota juga akan mati menjadi kota mayat (*necropolis*), jika tidak ditata dan dirawat dengan baik (Ahamad, 2002). Kondisi Kota Jakarta sebagai lokasi tempat Taman Suropati berada tentunya juga akan mempengaruhi kondisi baik secara fungsi maupun makna Taman Suropati, begitu juga sebaliknya, kondisi taman kota akan merepresentasikan citra dan identitas kota.

Kini jauh setelah Indonesia merdeka, setelah mengalami beberapa pemerintahan, taman-taman kota telah mengalami perubahan baik dalam segi fungsi maupun dari kegiatan masyarakat yang mengisinya. Bahkan pasca Orde Baru reformasi, pemerintah pun telah sangat mendukung optimalisasi fungsi dari taman-taman kota di Indonesia. Sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan kesehatan yang dicanangkan oleh Presiden BJ. Habibie pada tanggal 1 Maret 1999, yaitu tentang Pembangunan Berwawasan Kesehatan: bahwa setiap pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan aspek dan berdampak pada kesehatan. Berdasar pada konsep tersebut kemudian diteruskan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009: bahwa untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat perlu dilakukan pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan.

Ketika demokrasi sudah mulai berjalan dengan baik di negeri ini (baca: Indonesia), yaitu era pasca orde baru, ketika pemerintah pusat sudah dianggap ‘longgar’ bagi pemerintah daerah, maka ruang terbuka publik sudah mulai diperlakukan dengan lain. Perlakuannya antara lain yaitu sudah mulai diperhatikan, bahkan pemerintah kota pun mulai ikut serta, yaitu dengan mengajak masyarakat kota untuk secara aktif mengisi makna ruang-ruang terbuka publik. Pemerintah DKI mulai menggalakkan kepada seluruh warganya termasuk kalangan menengah untuk menggunakan sarana publik seperti: TransJakarta, KRL, adanya konsep *Car Free Day*, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar kelas menengah juga tertarik menggunakan ruang dan prasarana publik.



Gambar 3. Kondisi Taman Suropati kini

masyarakat dari berbagai kalangan. Bahkan pagar pun kini dibuka, bangku taman disediakan dengan banyak dan nyaman, tempat sampah, mushola, toilet umum, jalur pejalan kaki dan sepeda juga dibuat dengan baik (memenuhi syarat), serta kebutuhan masyarakat akan teknologi pun dipenuhi oleh pemerintah kota dengan menyediakan sinyal *wi-fi* di Taman Suropati. Ke semua itu adalah untuk membuat masyarakat dari berbagai kalangan tertarik menggunakan taman kota. Tidak peduli apakah itu berada di lingkungan elit (para duta besar) atau di pusat kota Jakarta sekalipun. Dapat dilihat ketika pergantian kuasa atas ruang, yakni Taman Suropati, identitas yang terbentuk sesuai dengan citra kota yang dikonstruksikan. Keikutsertaan masyarakat atas penggunaan Taman Suropati, juga peran pemerintah atas mengondisikan taman-taman kota di Jakarta, termasuk Taman

Suropati, dapat mencitrakan penataan ruang tata kota yang lebih beradab. Suatu tata kota tidak lahir karena maksimalisasi teknologi atau ekonomi, namun karena suatu pola sosio kultural masyarakatnya. Pemilihan pemukiman kota memang dapat berdasarkan alasan-alasan ekonomi seperti kesuburan tanah, tetapi pembentukan kota selalu dengan pertimbangan-pertimbangan sosio-kultural (Kuntowijoyo, 2003). Sehingga, untuk menciptakan suatu citra kota yang ideal, diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai sosio-kultural yang terdapat dalam masyarakat sebagai suatu filosofi dan pola pikir dalam suatu konsep perancangan kota. Dalam hal ini kota dapat diartikan sebagai hasil transformasi dari kondisi sosio-kultural masyarakatnya.

Dalam arsitektur tata ruang kota yang merujuk pada Lynch (1975, dalam Zahnd,

2007), citra yang dibentuk dan terbentuk pada Taman Suropati atas kota berubah-ubah sesuai dengan kuasa politik dan kultur yang terjadi pada masanya. Ketika era Kolonial berkuasa, Taman Suropati menjadi kawasan atau disebut juga *district*, yaitu kawasan para elit warga Belanda. Kemudian pada masa Orde Lama, ia berubah menjadi hanya *nodes*, yakni persimpangan jalanan yang berbentuk lingkaran dan dikelilingi oleh pemukiman dan satu jalanan besat (utama). Berbeda lagi dengan pada masa Orde Baru, ketika taman ini tertutup dengan pohon besar berpagar rapat, seakan seperti hutan. Citra Taman Suropati seperti tidak bermakna, walaupun berupa persimpangan jalan, ia menjadi tidak terlihat dan menutupi persimpangan jalan yang lain. Kini di era Reformasi, citra kota yang ditampilkan menjadi lebih hidup. Revitalisasi atas Taman Suropati dan taman kota lainnya membuat kota Jakarta memiliki *landmark-landmark*.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Sugiono Soetomo berpendapat bahwa kota merupakan suatu pusat kekuatan politik, kebudayaan dan ekonomi wilayah. Oleh karena itu secara kesejarahan kekuatan urbanisasi yang terbentuk dalam suatu kota akan selalu membentuk polar atau kutub, secara sosial, ekonomi dan politik, yang kemudian akan menciptakan dan menghasilkan bentuk wadah kehidupan-dalam bentuk bangunan-bangunan fisik-yang pada akhirnya membentuk suatu morfologi kota (Soetomo, 2009).

SIMPULAN

Taman kota juga merupakan salah satu tempat yang direkomendasikan untuk menghilangkan penat setelah beraktivitas seharian. Selain itu juga merupakan ruang publik yang berfungsi sebagai tempat berinteraksi warga sekitarnya, untuk para pedagang maupun sebagai ruang untuk membangun sebuah pemerintahan, serta menyampaikan aspirasi warga kotanya, serta

dapat menjadi kebanggaan dan identitas yang mengandung makna bukan hanya mewakili kotanya tetapi juga bagi negaranya.

Suatu kota akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan tersebut meliputi beberapa aspek antara lain: fisik, sosial budaya, ekonomi, politik dan teknologi. Oleh karena itu, walaupun setiap kota akan memiliki persamaan dalam sebuah peta, namun perbedaan tiap kota akan terlihat jika menggunakan aspek-aspek tersebut di atas untuk membedakan dan mengingat identitas sebuah kota, struktur kota, dan arti kawasan perkotaan daripada melihat peta kotanya.

Pencitraan kota atas kuasa juga mempengaruhi fungsi dan masyarakat pengguna sebuah taman kota, sehingga ketika patronnya berubah atau berganti maka regulasi yang mengatur dan berdampak pada fungsi ruang dan masyarakat pengguna taman kota tersebut pun otomatis juga akan berubah. Tidak hanya itu, suatu ruang pun juga mempengaruhi identitas seseorang sebagai pengguna ruang tersebut. Ketika sebuah ruang memiliki citra yang “negatif”, maka identitas manusia, seseorang, masyarakat, sebagai pengguna ruang tersebut juga akan bermakna negatif. Begitu pula sebaliknya, ketika sebuah ruang memiliki citra “positif”, maka identitas manusia, seseorang, masyarakat, sebagai pengguna ruang tersebut juga akan bermakna positif.

Hal pokok yang patut digarisbawahi adalah pergeseran terhadap fungsi-kegiatan di taman kota terjadi dalam konteks kehidupan sosial politik yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan kuasa dominan yang juga berganti-ganti (adanya relasi kuasa di tiap era pemerintahan). Pergantian ke pemerintahan (sebagai dominan) yang berkuasa membawa kebijakan atau regulasi yang berbeda-beda pula, sesuai dengan maksud atau kepentingan penguasa di era masing-masing. Pemerintah kolonial dengan kebijakan politiknya membuat taman kota sebagai bagian penting dalam

suatu tata kota selain juga sebagai paru-paru kota, sekaligus ruang terbuka aktif khusus bagi masyarakat Belanda. Dengan dikotominya terhadap subjek penggunaannya, taman kota memiliki makna penting sebagai bagian penting dalam suatu konsep perencanaan tata kota kala itu, sekaligus juga citra dan identitas sebagai ruang simbolik kekuasaan era Kolonial.

Pembangunan kontemporer ibukota Indonesia baik dari sistem perencanaan tata kota maupun budaya yang dibentuk, bukan hanya merupakan produk kapitalisme, atau semata-mata hasil dari pengaruh budaya global. Hal tersebut tidak dengan sendirinya terbentuk secara tidak sengaja atau *accidental*, namun untuk memenuhi misi tersebut, politik rezim yang berkuasa dan memori kota secara kesejarahan turut serta dalam memainkan peranan penting.

Taman kota tidak hanya sekedar dimaknai sebagai Ruang Terbuka Hijau dengan fungsi penghijauan dan penambah estetis dalam wilayah perkotaan, namun juga dapat dimaknai sebagai ruang ekspresi, aspirasi, dan interaksi masyarakat kota tanpa batasan kelas masyarakat, serta memiliki nilai simbolik secara kesejarahan. Dengan begitu, taman kota dapat dioptimalkan secara fungsi dan makna ruangnya, sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi bagi seluruh masyarakat.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memperlihatkan sekaligus memberikan perspektif tentang pentingnya ‘taman kota’ dalam infrastruktur sebuah tata kota, taman kota juga tidak hanya sebagai ‘taman’ akan tetapi juga memiliki nilai kesejarahan yang menarik dan bermanfaat untuk dilakukan penelitian, baik untuk kepentingan praktis maupun untuk kepentingan memberikan kontribusi kepada pemikiran kebudayaan di Indonesia. Dengan melihat pada fungsi pemaknaan yang dimiliki taman kota, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kajian tata ruang kota

dengan studi taman kota dan bentuk-bentuk simbol citra kota di Indonesia khususnya di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmadin (2002). *Re-Desain Jakarta: Tata Kota Tata Kita 2020*. Jakarta Selatan: Penerbit KOTA KITA PRESS.
- Carmona, Matthew et all. (2003). *Public Places Urban Space*. Oxford: Architectural Press.
- Carr, Stephen (1994). “Public Space: The Town Planning Review” *Journal Vol. 65, No. 1*. London: Liverpool University Press.
- Fireza, Doni (2000). *Pengaruh English Landscape Gardening pada Taman-taman di Kota Bandung*, Riset Desain, Program Magister Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Bandung: Fakultas Teknik Arsitektur ITB.
- Heuken, Adolf (2001). *Menteng: Kota Taman Pertama di Indonesia*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- (2014). *Historical Atlas of Jakarta-Atlas Sejarah Jakarta*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- Kunto, Haryoto (1986). *Semerbak Bunga di Bandung Raya*. Bandung: PT. Granesia.
- Kuntowijoyo (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Kusno, Abidin (2009). *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca- Suharto*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Low, Setha M. (Ed.). (1999). *Theorizing the City. The New Urban Anthropology Reader*. Piscataway: Rutgers University Press
- Pocock, D.C.D. (1993). *Durham: A Souvenir Colour Guide to the History and Culture of One of Britain's Best-loved Cities (Pevensy Heritage Guides) 2nd Revised edition*. United Kingdom:

- David & Charles Publisher.
- Soekiman, Djoko (2000). *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII – Medio Abad XX)*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Soetomo, Sugiono (2009). *Urbanisasi dan Morfologi, Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruang Fisiknya: Menuju Ruang kehidupan yang Manusiawi*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Zahnd, Markus (2007). *Strategi Arsitektur 2: Perancangan Sistem Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.